

**ANALISIS EFISIENSI BELANJA SEKTOR PUBLIK
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang*



OLEH :

SEPTIA MAILINA
BP/NIM : 2021/21060105

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

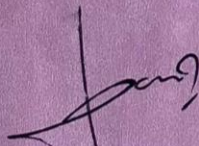
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS EFISIENSI BELANJA SEKTOR PUBLIK
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Septia Mailina
NIM/TM : 21060105/2021
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Juli 2025

Mengetahui,
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi,



Dr. Novya Zulva Riani, S.E., M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001

Disetujui dan Disahkan oleh
Pembimbing,



Dr. Alpon Satrianto, S.E., M.E
NIP. 19850909 201404 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

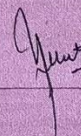
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS EFISIENSI BELANJA SEKTOR PUBLIK DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Septia Mailina
NIM/TM : 21060105/2021
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Juli 2025

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Dr. Alpon Satrianto, SE., M.E	1. 
2	Anggota	: Mike Triani, SE., M.M	2. 
3	Anggota	: Dr. Ariusni, SE., M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septia Mailina
NIM/TM : 21060105/ 2021
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pondok / 03 mei 2002
Departemen/Keahlian : Ilmu Ekonomi / Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Efisiensi Belanja Sektor Publik di Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat

No. HP : 085264358665

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2025
Yang Menyatakan,



Septia Mailina
NIM.21060105

ABSTRAK

Septia Mailina (21060105/2021) : Analisis Efisiensi Belanja Sektor Publik di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE., ME

Abstract: *This study aims to measure the efficiency level of public spending in the education, health, and economic sectors. The data used are panel data comprising information from 19 regencies/municipalities in West Sumatra Province for the period 2018–2022. The data are secondary data obtained from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Fiscal Balance. This study employs the Data Envelopment Analysis (DEA) method. Efficiency measurement in this study is based on the Variable Return to Scale assumption with an output-oriented approach. The results show that: (1) in the education sector, 1 city has achieved perfect efficiency, 11 regencies/municipalities have achieved high efficiency, and 7 regencies/municipalities have achieved moderate efficiency; (2) in the health sector, 2 cities have achieved perfect efficiency, and 17 regencies/municipalities have achieved high efficiency; and (3) in the economic sector, no regency/municipality has achieved perfect efficiency, 12 regencies/municipalities have achieved high efficiency, and 7 regencies/municipalities have achieved moderate efficiency.*

Keywords: *Efficiency, Public Sector Spending, Data Envelopment Analysis (DEA)*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi belanja sektor publik pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Data yang digunakan merupakan data panel yaitu berupa data dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018-2022. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode *Data Envelopment Analysis*. Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan asumsi *Variabel Return to Scale* dengan berorientasi output (*output-oriented*). Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat 1 kota yang telah mencapai efisiensi sempurna, 11 kabupaten/kota mencapai efisiensi tinggi dan 7 kabupaten/kota mencapai efisiensi sedang pada sektor pendidikan, (2) terdapat 2 kota yang telah mencapai efisiensi sempurna, dan 17 kabupaten/kota mencapai efisiensi tinggi pada sektor kesehatan dan (3) tidak ada kabupaten/kota yang mencapai efisiensi sempurna, 12 kabupaten/kota mencapai efisiensi tinggi dan 7 kabupaten/kota mencapai efisiensi sedang pada sektor ekonomi.

Kata kunci: *Efisiensi, Belanja Sektor Publik, dan Data Envelopment Analysis (DEA)*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya hingga hari ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “Analisis Efisiensi Belanja Sektor Publik di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat”. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan kepada umat manusia untuk menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak mulia seperti ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Perengki, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, SE, M.Si selaku kepala departemen Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Mike Triani, SE, MM selaku dosen penguji I yang telah memberikan ilmu, masukan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr. Ariusni, SE, M.Si selaku dosen penguji II yang telah memberikan ilmu, masukan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi beserta seluruh karyawan yang telah memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Terimakasih atas layanan dan perhatian yang diberikan.
8. Kak Asma Lidya, Amd selaku Admin Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan masukan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menuntaskan misi skripsi ini dan membantu penulis dalam hal pengurusan administrasi.
9. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda tercinta (Alm) Anril yang telah lebih dulu berpulang ke hadirat-Nya. Terima kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tak pernah berhenti meski ragamu telah tiada. Setiap langkah hari ini adalah hasil dari didikan, nasihat, dan semangat yang Ayah tanamkan sejak dulu. Meski Ayah tak sempat menyaksikan pencapaian ini, penulis yakin Ayah selalu hadir dalam setiap detak langkah penulis, mendoakan dalam diam dari tempat terbaik di sisi-Nya. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk bakti penulis yang mampu membuatmu bangga di alam sana.

10. Pintu Surgaku, Ibunda Andriani sosok yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kesabaran yang tak terhingga, dan cinta yang tulus sejak hari pertama penulis mengenal dunia. Tanpa Ibu, penulis tidak akan sampai pada titik ini. Semoga pencapaian kecil ini bisa menjadi salah satu bentuk bakti walau tak akan pernah sebanding dengan segala yang telah Ibu berikan.
11. Buya Ali Warman sosok yang mungkin bukan ayah sejak penulis lahir, tapi hadir dan memilih untuk menjadi bagian penting dalam hidup penulis. Terimakasih atas kesabaran, bimbingan dan kasih sayang yang tak pernah kau bedakan. Jejak kebaikanmu akan selalu menjadi bagian-bagian dari langkah penulis. Semoga pencapaian kecil ini bisa menjadi bentuk terimakasih atas semua yang telah buya lakukan.
12. Adik-adikku tersayang, Liaza Hasanah dan Rahmat Arrija Halim yang selalu menjadi penyemangat dalam diam, sumber tawa di saat lelah, dan pengingat bahwa penulis punya seseorang yang menaruh harapan pada penulis. Terima kasih atas dukungan sederhana yang sering tak kau sadari begitu berarti.
13. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan studi ini. Teman-teman IE FE UNP 2021 yang telah berbagi cerita dan pengalaman suka dan duka serta rekan-rekan sesama bimbingan akademik yang sama-sama berjuang, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
15. Terakhir terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Septia Mailina. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terimakasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Mari bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Semoga segala bentuk bantuan dan dukungan dari segala pihak dinilai ibadah oleh Allah SWT. Penulis menyadari dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran.

Padang, Juli 2025

Penulis
Septia Mailina

DAFTAR ISI

ABSTRAK	.i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Kajian Teori	17
1. Pengeluaran Pemerintah.....	17
2. Teori Pengeluaran Pemerintah	18
3. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah	20
4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	23
5. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.....	24
6. Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi.....	25
7. Efisiensi.....	26
8. Konsep Desentralisasi	30
9. Pengukuran Efisiensi Metode Ekonometrik.....	33
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Konseptual	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Definisi Operasional.....	45
G. Teknik Analisis Data	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
B. Deskriptif Variabel Data Penelitian	59
C. Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi.....	87
1. Nilai Efisiensi Sektor Pendidikan	88
2. Nilai Efisiensi Sektor Kesehatan.....	90
3. Nilai Efisiensi Sektor Ekonomi.....	91
D. Target Perbaikan Output Untuk Mencapai Kondisi Efisiensi.....	93
E. Kuadran Hasil.....	98
F. Pembahasan Analisis DEA Per Sektor.....	108
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Pemerintah Perkapita Bidang Pendidikan, Rata-Rata Lama Sekolah Dan Harapan Lama Sekolah	6
Tabel 1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Perkapita Bidang Kesehatan Dan Angka Harapan Hidup	8
Tabel 1.3 Realisasi Belanja Pemerintah Perkapita Bidang Ekonomi, Kepemilikan Akses Sanitasi Dan Kepemilikan Akses Sumber Yang Layak	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Definisi Operasional	46
Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Efisiensi	49
Tabel 3.3 <i>Decision Making Unit</i> (DMU) dan Variabel <i>input-Output</i>	50
Tabel 3.4 Kriteria Kuadran Hasil	53
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Belanja Pendidikan Per Kapita	60
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Rata-Rata Lama Sekolah	64
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Harapan Lama Sekolah	67
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Belanja Kesehatan Per Kapita	70
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Angka Harapan Hidup	73
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Belanja Ekonomi Per Kapita	77
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Kepemilikan Akses Sanitasi Yang layak	81
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Kepemilikan Akses Sumber Air Minum Yang Layak	85
Tabel 4.9 Nilai Efisiensi Sektor Pendidikan 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022	88
Tabel 4.10 Nilai Efisiensi Sektor Kesehatan 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022	90
Tabel 4.11 Nilai Efisiensi Sektor Ekonomi 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022	92
Tabel 4.12 Nilai Potential Improvement Sektor Pendidikan Tahun 2022	94
Tabel 4.13 Nilai Potential Improvement Sektor Kesehatan Tahun 2022	95
Tabel 4.14 Nilai Potential Improvement Sektor Ekonomi Tahun 2022	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	43
Gambar 3.1 Kuadran Hasil.....	54
Gambar 4.1 Kuadran Hasil Sektor Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah	99
Gambar 4.2 Kuadran Hasil Sektor Pendidikan Harapan Lama Sekolah.....	101
Gambar 4.3 Kuadran Hasil Sektor Kesehatan Angka Harapan Hidup	103
Gambar 4.4 Kuadran Hasil Sektor Ekonomi Kepemilikan Akses Sanitasi Yang Layak	105
Gambar 4.5 Kuadran Hasil Sektor Ekonomi Kepemilikan Akses Sumber Air Minum Yang Layak	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah).....	123
Lampiran 2. Data Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah).....	124
Lampiran 3. Data Belanja Pemerintah Sektor Ekonomi Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah).....	125
Lampiran 4. Data Jumlah Penduduk Tahun 2018-2022 (jiwa)	126
Lampiran 5. Data Belanja Pendidikan Perkapita (Rupiah)	127
Lampiran 6. Data Belanja Kesehatan Perkapita (Rupiah)	128
Lampiran 7. Data Belanja Ekonomi Perkapita (Rupiah)	129
Lampiran 8. Data Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun).....	130
Lampiran 9. Data Harapan Lama Sekolah (Tahun)	131
Lampiran 10. Data Angka Harapan Hidup (Tahun).....	132
Lampiran 11. Kepemilikan Akses Sanitasi yang Layak (Persen)	133
Lampiran 12. Data Kepemilikan Akses Sumber Air Minum yang Layak (Persen)...	134
Lampiran 13. Hasil Skor Efisiensi Sektor Pendidikan.....	135
Lampiran 14. Hasil Skor Efisiensi Sektor Kesehatan	139
Lampiran 15. Hasil Skor Efisiensi Sektor Ekonomi	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu wilayah tercermin dari peningkatan *output* yang dihasilkan oleh agen-agen ekonomi yang produktif. Proses pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada aspek kuantitas, tetapi lebih menekankan pada kualitas (Azmi, 2020). Sumber daya manusia yang berkualitas memegang peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi. Peningkatan mutu sumber daya manusia dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, tingkat pendidikan, serta pendapatan per kapita (Putra & Anitasari, 2020). Pembangunan manusia memegang peranan krusial dalam menentukan tingkat kemajuan suatu negara. Indikator kemajuan tidak hanya diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mencakup aspek harapan hidup, tingkat pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi (Kurniawan & Murtala, 2022).

Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan manusia, pemerintah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah sangat diperlukan untuk membiayai berbagai program tersebut. Mengingat beragamnya program yang dijalankan

sementara sumber daya anggaran terbatas, diperlukan pengalokasian dana yang efisien agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal (Nuryadin et al., 2020).

Desentralisasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dengan harapan terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 desentralisasi dijelaskan sebagai suatu penyerahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri pemerintahannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi diasumsikan bahwa pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerahnya guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan sosial. Secara prinsip tujuan utama desentralisasi meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan mencapai pembangunan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah berdasarkan sudut pandang pembangunan, desentralisasi dibutuhkan untuk mempercepat respon pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai kebutuhan daerah sehingga fungsi dan pelayanan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien (Pusparani, 2023).

Pelaksanaan desentralisasi dilakukan pada dasarnya agar proses penyelenggaraan pembangunan lebih efisien dan efektif terutama pada sisi anggaran. Sehubungan dengan penyediaan fasilitas pelayanan publik,

desentralisasi diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi sektor publik melalui pengeluaran pemerintah. Terkait dengan proses alokasi anggaran seringkali terjadi permasalahan seperti adanya pemborosan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia dan proses distribusi yang kurang tepat sasaran. Hal tersebut menyebabkan tidak efisiennya pengeluaran pemerintah yang akan berdampak pada proses pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Oleh karena itu tugas pemerintah bukan hanya sekedar mengalokasikan anggaran namun juga memastikan bahwa pengalokasian tersebut efisien dan tepat sasaran.

Isu efisiensi belanja pemerintah menjadi perhatian global yang kian intens. Berbagai negara, baik yang sudah maju maupun sedang berkembang, mulai menyadari pentingnya mengelola anggaran publik secara efektif dan efisien. Dorongan dari masyarakat, lembaga internasional, serta kondisi fiskal yang semakin kompleks menjadikan efisiensi belanja sebagai indikator penting dalam menilai kinerja pemerintahan. Belanja publik yang efisien tidak hanya mencerminkan penggunaan sumber daya secara bijaksana, tetapi juga menjadi alat strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Efisiensi merupakan salah satu azas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam Permendagri No 13 tahun 2006 pasal 4, dijelaskan efisien sebagai pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Berdasarkan konsep tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) sebagai masukan (*input*) bagi pemerintah daerah dimanfaatkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang bermanfaat bagi masyarakat, serta untuk mencapai hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang dirasakan secara nyata. Oleh karena itu, apabila dana publik dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga menghasilkan keluaran yang maksimal dan bernilai guna, maka penggunaan dana tersebut dapat dikatakan efisien (Rambe, 2020).

Efisiensi dalam pemerintahan lebih mengacu pada penggunaan sumber daya yang digunakan untuk pengeluaran belanja pemerintah. Efisiensi dalam hal ini merupakan kunci utama untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia agar dapat dialokasikan pada sektor-sektor pembangunan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penggunaan sumber daya yang efisien akan mempengaruhi proses akselerasi pencapaian target pembangunan. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya pengeluaran belanja pemerintah yang efisien akan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang optimal.

Efisiensi pengeluaran pemerintah merujuk pada suatu keadaan di mana alokasi sumber daya tidak dapat lagi diubah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memberikan manfaat kesejahteraan secara maksimal. Apabila kondisi ini tercapai, maka pengeluaran pemerintah dapat dikatakan telah berada pada tingkat efisiensi optimal (Nuryadin et al., 2020).

Kendala terbesar yang menjadi persoalan mendasar dalam anggaran pemerintah adalah adanya keterbatasan anggaran (budget constraints) pada satu sisi, di sisi lain pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai isu strategis, seperti pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ketimpangan sosial, serta pelestarian lingkungan yang kerap dianggap sebagai tanggung jawab utama pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk menghasilkan belanja publik yang berkualitas melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai target pembangunan .

Efisiensi menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dilihat lebih jauh, karena secara umum daerah yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi tentu akan menghasilkan output yang paling optimal. Dengan kata lain, daerah yang telah mencapai tingkat efisiensi belanja pemerintah tersebut, dapat dikatakan pula bahwa program-program yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah daerah tersebut telah berhasil.

Pada penelitian ini belanja sektor publik yaitu disektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi topik pembahasannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cukup banyak penelitian menggunakan belanja per kapita untuk fungsi khusus seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga penelitian ini juga menggunakan belanja per kapita untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai input dalam pengukuran efisiensi. Sementara itu output yang sering digunakan adalah angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan output

harapan lama sekolah, kepemilikan akses sanitasi dan kepemilikan akses terhadap sumber air minum yang layak belum banyak diteliti. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pristian Putri & Prasetyia, 2023) pada belanja sektor ekonomi peneliti tidak mempertimbangkan kepemilikan akses sanitasi dan air minum yang layak sebagai bentuk perluasan akses masyarakat terhadap infrastruktur publik.

Penggunaan *input* dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi penting karena setiap daerah memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak, sehingga anggaran belanjanya juga lebih besar. Pemerintah daerah dengan jumlah penduduk yang banyak tentu menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengatur dan menggunakan dana yang ada, dibandingkan dengan daerah yang penduduknya sedikit. Sehingga penghitungan efisiensi dinilai lebih objektif mempertimbangkan belanja per kapita.

Berikut ini disajikan data yang menggambarkan perkembangan belanja pemerintah per kapita untuk sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi di provinsi sumatera barat dari tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Pemerintah Perkapita Bidang Pendidikan, Rata-Rata Lama Sekolah Dan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Pendidikan Perkapita (Rupiah)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
2018	Rp551.306	8,76	13,95
2019	Rp585.416	8,92	14,01
2020	Rp547.374	8,99	14,02
2021	Rp543.115	9,07	14,09
2022	Rp393.991	9,18	14,10

Sumber: DJPK Kemenkeu dan BPS Sumatera Barat (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang cukup mencolok antara besaran input (belanja pendidikan per kapita) dan capaian output pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah). Pada tahun 2018, belanja pendidikan per kapita tercatat sebesar Rp551.306, dengan rata-rata lama sekolah sebesar 8,76 tahun dan harapan lama sekolah sebesar 13,95 tahun. Pada tahun 2019, belanja per kapita meningkat menjadi Rp585.416, disertai dengan peningkatan output pendidikan menjadi 8,92 tahun untuk rata-rata lama sekolah dan 14,01 tahun untuk harapan lama sekolah. Puncak ketidakseimbangan terjadi pada tahun 2022, ketika belanja pendidikan per kapita mengalami penurunan drastis menjadi Rp393.991 angka terendah dalam lima tahun terakhir namun rata-rata lama sekolah justru meningkat menjadi 9,18 tahun, dan harapan lama sekolah menjadi 14,10 tahun. Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa peningkatan output pendidikan tidak lagi berbanding lurus dengan peningkatan belanja pendidikan, atau bahkan dapat terjadi tanpa adanya peningkatan belanja.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan output pendidikan terus berlangsung meskipun terjadi penurunan belanja pendidikan per kapita. Artinya, alokasi anggaran yang lebih rendah tidak serta-merta berdampak negatif terhadap capaian pendidikan. Kondisi ini menandakan adanya potensi ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran pendidikan pada periode sebelumnya, di mana peningkatan anggaran tidak

menghasilkan peningkatan output yang signifikan. Sebaliknya, dalam situasi anggaran yang menurun, output tetap mengalami kenaikan, yang mengarah pada indikasi bahwa peningkatan capaian pendidikan dapat terjadi meskipun dukungan anggaran berkurang.

Tabel 1. 2 Realisasi Belanja Pemerintah Perkapita Bidang Kesehatan Dan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Kesehatan Perkapita (Rupiah)	Angka Harapan Hidup (Tahun)
2018	Rp132.742	69,01
2019	Rp130.778	69,31
2020	Rp118.087	69,47
2021	Rp111.712	69,59
2022	Rp134.654	69,90

Sumber: DJPK Kemenkeu dan BPS Sumatera Barat (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara besaran belanja kesehatan per kapita sebagai input, dan angka harapan hidup sebagai output. Ketidaksesuaian antara peningkatan atau penurunan alokasi anggaran dengan capaian hasil kesehatan ini menunjukkan potensi inefisiensi dalam pengelolaan belanja sektor kesehatan.

Pada tahun 2018, belanja kesehatan per kapita tercatat sebesar Rp132.742, dengan angka harapan hidup sebesar 69,01 tahun. Pada tahun 2019, alokasi belanja mengalami sedikit penurunan menjadi Rp130.778, namun angka harapan hidup justru meningkat menjadi 69,31 tahun. Fenomena serupa kembali terjadi pada tahun 2020, ketika belanja kesehatan per kapita turun menjadi Rp118.087, tetapi angka harapan hidup

tetap mengalami kenaikan menjadi 69,47 tahun. Ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran menurun secara bertahap selama dua tahun berturut-turut, output sektor kesehatan tetap mengalami perbaikan, meskipun tidak signifikan. Tren tersebut berlanjut pada tahun 2021, dengan belanja kesehatan per kapita menyentuh angka terendah selama periode pengamatan, yaitu sebesar Rp111.712, namun angka harapan hidup masih meningkat menjadi 69,59 tahun.

Ketidaksesuaian antara peningkatan input dan hasil output kesehatan tersebut menimbulkan indikasi bahwa peningkatan anggaran belum tentu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam angka harapan hidup. Jika peningkatan output tidak sebanding dengan peningkatan input, maka terdapat indikasi bahwa sumber daya publik belum digunakan secara efisien. Sebaliknya, apabila output meningkat secara signifikan meskipun input menurun, hal ini menunjukkan adanya potensi efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Tabel 1.3 Realisasi Belanja Pemerintah Perkapita Bidang Ekonomi, Kepemilikan Akses Sanitasi Dan Kepemilikan Akses Sumber Air Minum Yang Layak Sumatera Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Ekonomi Perkapita	Akses Sanitasi	Akses Sumber Air Minum
2018	Rp91.223	57,17	69,53
2019	Rp89.286	63,98	81,44
2020	Rp60.852	68,11	83,37
2021	Rp297.591	68,68	83,4
2022	Rp180.639	69,27	85,23

Sumber: DJPK Kemenkeu dan BPS Sumatera Barat (diolah)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, menunjukkan terdapat indikasi ketidakseimbangan antara besarnya alokasi belanja ekonomi per kapita dan capaian output pembangunan. Hal ini memunculkan dugaan adanya inefisiensi dalam pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan. Ketidakseimbangan tersebut terlihat dari fluktuasi input yang cukup tajam dari tahun ke tahun, sementara output menunjukkan tren yang relatif meningkat secara stabil. Pada tahun 2018, belanja ekonomi per kapita sebesar Rp91.223, dengan akses sanitasi sebesar 57,17% dan akses air minum sebesar 69,53%. Tahun 2019 menunjukkan sedikit penurunan alokasi anggaran menjadi Rp89.286, namun output mengalami lonjakan cukup signifikan: akses sanitasi meningkat menjadi 63,98%, dan akses air minum melonjak menjadi 81,44%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan output dapat terjadi meskipun input mengalami penurunan, yang mengindikasikan efisiensi pada tahun tersebut. Tahun 2021 menunjukkan lonjakan tajam dalam belanja ekonomi per kapita menjadi Rp297.591, hampir lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, peningkatan output yang dihasilkan tidak menunjukkan perubahan yang sebanding. Akses sanitasi hanya naik tipis menjadi 68,68%, dan akses air minum hanya sedikit meningkat menjadi 83,4%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa peningkatan input secara drastis tidak serta-merta menghasilkan peningkatan output yang signifikan, sehingga menimbulkan indikasi kuat terhadap inefisiensi penggunaan anggaran.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara tren input dan output. Dalam efisiensi belanja publik, setiap kenaikan anggaran sebanding dengan peningkatan output, dan sebaliknya. Ketika output tetap meningkat meskipun input menurun, maka terdapat potensi efisiensi. Sebaliknya, ketika input meningkat tajam namun output hanya meningkat sedikit, maka terdapat indikasi inefisiensi.

Secara keseluruhan, hubungan antara peningkatan pengeluaran dan indikator pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat masih belum optimal. Efisiensi penggunaan anggaran, efektivitas program, serta faktor internal dan eksternal lain berperan dalam menentukan hasil akhirnya. Efisiensi pengeluaran menjadi faktor penentu, dimana anggaran yang besar tanpa strategi dan program yang tepat sasaran mengakibatkan pengeluaran menjadi tidak efisien. Pengeluaran pemerintah di sektor-sektor ini belum mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran belanja pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi belum optimal.

Pengukuran efisiensi pengeluaran sektor publik daerah dalam konteks anggaran berbasis kinerja menjadi hal yang penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggaran secara optimal demi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nuryadin et al., 2020). Keberhasilan pembangunan semata-mata tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi seperti modal, pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan segala

sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi. Namun juga dilihat dari sisi bagaimana suatu negara dapat membangun kualitas sumber daya manusianya (Pristian Putri & Prasetyia, 2023).

Pentingnya kebijakan untuk menciptakan pengeluaran pemerintah yang efisien agar sesuai dengan tujuan pembangunan merupakan kebijakan makroekonomi penting dalam pemulihan ekonomi, terutama kebijakan untuk menekan defisit anggaran. Terbatasnya sumber daya penerimaan negara membuat pemerintah harus menggunakan sumber-sumber keuangan negara secara efektif dan efisien guna memperbaiki mutu pendidikan, perluasan layanan kesehatan dan menutup kesenjangan infrastruktur, yang mana semuanya itu pada akhirnya bermuara pada tujuan mengurangi kemiskinan dan membangun ekonomi yang kompetitif (Merini, 2013).

Umumnya terdapat beberapa cara untuk mengukur efisiensi suatu unit kegiatan. Namun, karena pada penelitian ini memiliki lebih dari satu output, maka diperlukan pendekatan yang memungkinkan untuk mengakomodir keadaan demikian. Dalam hal ini, metode yang diharapkan dapat memberikan hasil paling komprehensif adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA). Analisis DEA (*Data Envelopment Analysis*) menjadi alat dalam mengukur efisiensi melalui pendekatan Input – output. variabel yang digunakan sebagai input mencakup total pengeluaran pemerintah perkapita untuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sedangkan variabel output rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup,

kepemilikan akses sanitasi yang layak dan kepemilikan akses sumber air minum yang layak.

Dalam metode DEA, belanja pemerintah dikatakan efisien sempurna apabila unit yang dianalisis memiliki skor efisiensi sebesar 1 (atau 100%), efisien tinggi memiliki skor pada range 0,81-0,99, efisiensi sedang memiliki skor pada range 0,60-0,80, efisiensi rendah memiliki skor pada range 0,41-0,60 dan tidak efisien memiliki skor dibawah 0,40.

Kelebihan penggunaan alat analisa ini dibandingkan alat lain adalah pemilihan data lebih fleksibel, yang tidak membutuhkan asumsi hubungan fungsional antara variabel input dan output, dapat digunakan untuk menilai efisiensi, kualitas, efektivitas dan kombinasinya, memiliki satuan ukuran dari Input dan Output . DEA dapat berbeda – beda serta tidak memerlukan sebuah asumsi bentuk fungsional untuk menghubungkan Input dengan Output dan dapat memberikan peringkat efisiensi berdasarkan data numerik dan tidak menggunakan opini subjektif dari seseorang.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penting untuk mengetahui apakah alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi di Sumatera Barat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi telah mencapai pada tingkat efisiensi yang optimal. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan pengukuran efisiensi pada pengeluaran pemerintah sektor publik dengan

melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Efisiensi Belanja Sektor Publik di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka diketahui bahwa perbandingan antara jumlah belanja dengan nilai output tidak linear sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
2. Bagaimana tingkat efisiensi Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
3. Bagaimana tingkat efisiensi Belanja Pemerintah Sektor Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi Belanja Pemerintah Sektor Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengenyam bangku pendidikan untuk kemudian di implementasikan dalam dunia nyata serta digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran berupa nilai efisiensi sektor publik dalam peningkatan pembangunan ekonomi dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil pada kemudian hari.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat efisiensi alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efisiensi sektor publik dan dapat

digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian di kemudian hari agar menghasilkan penelitian yang lebih baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis efisiensi belanja sektor publik di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2022, dapat ditarik hasil sebagai berikut:

1. Metode Data Envelopment Analysis (DEA) dapat digunakan untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit pengambil keputusan DMU (Decision Making Unit), yang didalamnya untuk membandingkan efisiensi relative sektor public pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Berdasarkan hasil pengukuran analisis DEA pada sektor pendidikan, selama kurun waktu 2018-2022, hanya terdapat 1 kota yang telah mencapai efisiensi sempurna. Daerah tersebut merupakan Kota Padang. Sedangkan 11 kabupaten/kota mencapai skor efisiensi tinggi dan 7 kabupaten/kota mencapai skor efisiensi sedang.
3. Berdasarkan hasil pengukuran analisis DEA pada sektor kesehatan, selama kurun waktu 2018-2022, hanya terdapat 2 kota yang telah mencapai efisiensi sempurna. Daerah tersebut merupakan Kota Padang dan Kota Bukittingi. Sedangkan 17 kabupaten/kota mencapai skor efisiensi tinggi.

4. Berdasarkan hasil pengukuran analisis DEA pada sektor ekonomi, selama kurun waktu 2018-2022, tidak ada kabupaten/kota yang mencapai efisiensi sempurna. Sedangkan 12 kabupaten/kota mencapai skor efisiensi tinggi dan 7 kabupaten/kota mencapai skor efisiensi sedang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat diharapkan pemerintah dapat mengalokasikan belanja sektor publik (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) yang lebih mengarah pada kualitas sumber daya manusia, seperti perbaikan sarana/prasarana sekolah dan puskesmas, kualitas tenaga pendidik dan kesehatan, bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah, percepatan pembangunan infrastruktur dasar publik.
2. Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi program-program sosial yang berkaitan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKNKIS), dan bantuan lainnya, apakah belanja yang digunakan sesuai target kebutuhan di daerah tersebut atau belum sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

3. Perlunya monitoring dan evaluasi yang terus-menerus terhadap pengeluaran pemerintah daerah khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sehingga pemborosan pengeluaran pemerintah daerah dieliminir.
4. Untuk daerah yang belum efisien pengeluaran pemerintahnya baik di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi hendaknya memperbaiki kinerja pemerintahannya. Hal ini dilakukan agar pengalokasian pengeluaran pemerintah di ketiga sektor tersebut dapat terealisasi dengan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiyansyah, S. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 270–283. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.77>
- Azmi, F. (2020). Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 46–64. <https://lib.unnes.ac.id/24985/>
- Azwardi, A. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi Di Indonesia Untuk Fungsi Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan Serta Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Penduduk Miskin Tahun 2011-2013. *Jurnal EkonomiPembangunan*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.29259/jep.v12i1.4862>
- Desmawan, D., & Syaifudin, R. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 10(1), 117. <https://doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8594>
- Fahlevy, M. R., & Burhanudin, B. (2022). Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar). *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 74–84. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.31>
- Handayani. (2016). Analisis Efisiensi Teknis Pendidikan Dengan Metode Data Envelopment Analysis Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kurniawan, I., & Murtala, M. (2022). Efisiensi Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Secara Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 4(2), 1. <https://doi.org/10.29103/jeru.v4i2.6051>
- Marsondang, A., Purwanto, B., & Mulyati, H. (2020). Pengukuran Efisiensi Serta Analisis Faktor Internal dan Eksternal Bank yang Memengaruhinya. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 10(1), 48–62. <https://doi.org/10.29244/jmo.v10i1.28860>
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Africano, F., & Loressa, M. (2021). Efisiensi Dan Efektivitas Belanja Langsung Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 180. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.4172>
- Merini, D. (2013). *Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik di Kawasan Asia Tenggara: Aplikasi Data Envelopment Analysis*. Universitas Brawijaya.

- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Nuryadin, M. R., Rahayu, D., & Muzdalifah, M. (2020). Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan. *Ecoplan : Journal of Economics and Development Studies*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i1.82>
- Pristian Putri, R. D., & Prasetyia, F. (2023). Efisiensi Relatif Belanja Sektor Publik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur: Pendekatan Data Envelopment Analysis (Dea). *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 233–248. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.01>
- Pusparani, A. D. (2023). *Skripsi Pengukuran Efisiensi Pengeluaran Sektor Publik Dalam Rangka Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)(Kasus pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2020)*.
- Putra, T. M., & Anitasari, M. (2020). Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Di Indonesia (Data Envelopment Analysis). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i1.10859>
- Putri, A. R., Janah, H. M., Renadia, R., & Istiqomah, N. (2022). *Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)*. 1–11.
- Rambe, R. A. (2020). Inefisiensi Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia: Pendekatan DEA dan Regresi Logit. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(4), 311–324. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.175>
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1), 27–36. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Yulianti, Y. (2021). Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kajian Ekonomi Syariah. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 7(2), 119–124.